



**PENETAPAN**

Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

tempat dan tanggal lahir Tambak Danau, 01 April 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Domisili elektronik : khairiyah2783@gmail.com sebagai **Penggugat;**

lawan

tempat dan tanggal lahir Penjambuan, 10 November 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel Las, tempat kediaman di sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

**Dalil Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astambul,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
09/09/1/2001, tertanggal 03 Januari 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di  
Keluarga Tergugat di selama kurang lebih 22 tahun 4 bulan dan kumpul  
terakhir di alamat tersebut;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai orang anak yang bernama dan saat ini anak tersebut tinggal  
bersama Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun  
2001 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan  
Tergugat disebabkan antara lain :

5.1. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah wajib kepada  
Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak menentu sehingga untuk  
memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja  
sebagai asisten rumah tangga;

5.2. Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri,  
temperamental dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada  
Penggugat, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata talak  
kepada Penggugat;

5.3. Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam  
rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul dibagian kepala,  
bahu, dan juga menendang Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada  
bulan April 2023 Tergugat kembali mengucapkan talak kepada Penggugat,  
kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah  
orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu  
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling  
pedulikan lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun  
6 bulan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut lagi;

## Permohonan Pencabutan Perkara

Bahwa kemudian Penggugat atas nasehat Majelis Hakim menyatakan akan berusaha mencari alamat Tergugat dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak hadir dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat mencabut perkaranya;

## **Pertimbangan Permohonan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk bersabar dulu tidak bercerai dengan Tergugat dan mencari alamat Tergugat. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Pencatatan Pencabutan Perkara Dalam Register Perkara**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Mtp





Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 37.000,00
.		
3		
4	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
.		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 192.000,00</b>
	<b>(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)</b>	